

**LAPORAN**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2023**  
**( LKj-IP SKPD )**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

TAHUN 2024

---

## KATA PENGANTAR

Penyusunan LKj-IP SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 mengacu kepada Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini diharapkan menjadi sarana untuk menginformasikan tentang pencapaian target kinerja dan proses pencapaiannya yang berkaitan dengan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023.

Disamping itu, LKj-IP disusun dengan maksud sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan laporan ini meskipun belum maksimal, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi penyusunan LKj-IP Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

Sumbang saran untuk perbaikan penyusunan pada tahun-tahun berikutnya sangatlah diharapkan sehingga penyusunan LKj-IP tahun berikutnya dapat lebih berkualitas.

Praya,  
Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.PD  
NIP. 196705211992031011

Dalam Perjanjian Kinerja 2023 ditetapkan empat sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis yang ditetapkan. Ketiga sasaran strategis tersebut, meliputi 1).meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah, dengan indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Nilai Hasil Asesmen Nasional Pendidikan SD, Nilai Hasil Asesmen Nasional Pendidikan SMP, PAUD Terakreditasi, SD Terakreditasi, SMP Terakreditasi, PTK PAUD, PTK SD, dan PTK SMP Terakreditasi, APK PAUD, APK SD/MI, APK SMP/MTs, Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs, 2).menguatnya karakter peserta didik, dengan indikator Satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal, dan Satuan pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal, 3).meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan, dengan indikator Nilai SAKIP OPD. 4). Meningkatnya event seni dan budaya yang dilaksanakan, dengan indikator Persentase seni dan budaya daerah yang layak pentas, Persentase situs budaya daerah yang terpelihara.

Dari keempat sasaran strategis tersebut rata-rata pencapaiannya adalah sebagai berikut: 1).meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat rata-rata capaian kinerja 110,01% atau kategori Amat Baik, 2). menguatnya karakter peserta didik dasar rata-rata capaian kinerja 115,00% atau kategori Amat Baik, 3). meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan rata-rata capaian kinerja 100,00% atau kategori Baik, dan 4). Meningkatnya event seni dan budaya yang dilaksanakan rata-rata capaian kinerja 100% atau kategori Baik.

Dari total anggaran sebesar Rp. 804.765.519.093,00 diuraikan kedalam 8 program utama 20 kegiatan, dan 77 sub kegiatan, terealisasi sebesar Rp. 763.034.408.084,00 (94,81%).

Dari beberapa indikator sasaran strategis terdapat beberapa indikator yang walaupun tingkat pencapaiannya sudah memenuhi target yang ditetapkan, misalnya lembaga PAUD terakreditasi A, dari 376 lembaga PAUD yang telah terakreditasi B dan C mencapai 69,83% sedangkan belum terdapat lembaga PAUD yang terakreditasi A sesuai dengan yang ditargetkan, hal ini disebabkan karena lemahnya kapasitas manajemen satuan pendidikan, kurangnya sarana-prasarana, sistem kearsipan yang lemah, belum sinkronnya program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan RKAS sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya delapan standar nasional pendidikan.

Beberapa solusi telah dilakukan, antara lain dengan peningkatan kapasitas manajemen satuan pendidikan melalui pelatihan dan workshop, pembinaan secara berjenjang melalui pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial oleh pengawas pendidikan

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**I.1 Tugas, Fungsi Perangkat Daerah**

- 1). Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pendidikan kebudayaan;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**I.2 Data Kepegawaian**

Jumlah Pegawai pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah pada 31 Desember 2023 adalah sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

Tabel 1.1  
Data Pegawai Dinas Pendidikan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Tengah  
Keadaan 31 Desember 2023

NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1.	ESELON	
	a. II b	1
	b. III a	1
	c. III b	4
	d. IV a	27
	e. IV b	12
2.	JABATAN FUNGSIONAL	
	1. Fungsional Guru (TK, SD, SMP)	3.906
	a. Pangkat/Golongan	
	(1) Golongan IV	1.846
	(2) Golongan III	1.664
	(3) Golongan II	396
	b. Pendidikan	
	(1) S3	-
	(2) S2	59
	(3) S1/D4	3.788
	(4) D3	4
	(5) D2	55
	(6) D1	-
	2. Fungsional Pengawas (TK, SD, SMP)	
	a. Pangkat/Golongan	86

NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
	(1) Golongan IV	86
	(2) Golongan III	
	b. Pendidikan	
	(1) S3	1
	(2) S2	14
	(3) S1/D4	71
	3. Fungsional Perencana	1
3.	JABATAN STUKTURAL	
	a. Pangkat/Golongan	147
	(1) IV	15
	(2) III	95
	(3) II	35
	(4) I	2
	b. Pendidikan	147
	(1) S3	1
	(2) S2	8
	(3) S1/D4	78
	(4) D3	5
	(5) D2	1
	(6) D1	
	(7) SMA Sederajat	48
	(8) SMP Sederat	3
	(9) SD Sederajat	3

### I.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan, bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) untuk periode lima tahun. Menindaklanjuti UU tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun Renstra Tahun 2021–2026 yang merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mendasarkan pelaksanaan program yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

## II.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyusun Renstra yang sinkron dan mengacu RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk mendukung pencapaian program pembangunan khususnya bidang pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah dengan fokus prioritas peningkatan tingkat pendidikan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

Dengan tersusunnya Renstra 2021-2026, berarti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan perencanaan yang berisi visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran. Perencanaan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

### 1. Pernyataan Visi

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 telah menetapkan komitmen untuk mewujudkan visi Kabupaten Lombok Tengah ke depan, yaitu, “Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA)”

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama. Visi BERSATU JAYA ini mengandung 5 (lima) kata kunci, yaitu:

- (1) kata 'beriman' merupakan gambaran utuh jiwa Akhlaqul Karimah masyarakat Lombok Tengah sebagai dasar dari seluruh aktifitas kehidupan yang dijalani masyarakat;
- (2) kata 'sejahtera' menggambarkan masyarakat Lombok Tengah yang terpenuhi segala kebutuhan dasarnya dengan cara yang mudah;
- (3) kata 'bermutu' merupakan kehendak bersama untuk mencapai Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kapasitas yang berstandar internasional;
- (4) kata 'maju' memuat tekad untuk menjadi barometer kemajuan daerah di tingkat regional maupun nasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif;
- (5) kata 'berbudaya' dimaksudkan sebagai prinsip utama dalam mengoptimalkan potensi dan identitas lokal berskala nasional/internasional (The heart of Lombok).

## 2. Pernyataan Misi

Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah dibidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah. Rumusan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan misi kedua Kabupaten Lombok Tengah adalah:

1. "Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul";
2. "Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur".

Misi kedua menekankan pada pentingnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup serta mampu bersaing dalam kancah nasional dan global.

## 3. Tujuan

Dalam menyelenggarakan misinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan tujuan utama yaitu

1. meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemda
3. Melestarikan seni dan budaya daerah.

## 4. Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan agar dapat dicapai secara nyata, ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
- (2) Meningkatnya mutu, relevansi dan daya saing pendidikan
- (3) Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan;
- (4) Meningkatnya nilai-nilai pengamalan seni dan budaya lokal ;

(5) Meningkatnya Event Seni dan Budaya yang dilaksanakan.

## 5. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah.	Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan	Peningkatan Partisipasi sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distribusi sumber daya pendidikan</li> <li>• Pemberian Stimulus pendidikan</li> <li>• Standardisasi Layanan Pendidikan di Semua Fasilitas Pendidikan</li> <li>• Perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan informal dan kesetaraan</li> </ul>
	Meningkatnya Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan	Peningkatan mutu penyelenggaran pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik</li> <li>• Peningkatan mutu proses pembelajaran</li> </ul>
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemda	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kualitas Perencanaan</li> <li>• Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan asset daerah</li> <li>• Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> <li>• Optimalisasi Pendapatan Daerah</li> <li>• Peningkatan Profesionalisme ASN</li> </ul>
Melestarikan seni dan budaya daerah	Jumlah situs yg dilestarikan	Pemetaan dan pendataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Kapasitas Penjaga situs</li> </ul>

## II.2 Rencana Kerja Tahunan

### A. Pengertian Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/unit kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan. Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan

utama, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran dan menetapkan target.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen, antara lain sasaran dan indikator kinerja.

#### **B. Penetapan Sasaran RKT**

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana yang dimuat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). Identifikasi sasaran adalah sasaran pada Renstra dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun berjalan, maka sasaran pada Renstra dapat dipindahkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Akan tetapi, apabila sasaran dan indikator kinerja sasaran pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun berjalan, maka dapat dipilih sasaran yang tertulis pada Renstra sesuai skala prioritas.

#### **C. Indikator Kinerja Sasaran**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator kinerja sasaran. Indikator Kinerja Sasaran secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan. Indikator kinerja sasaran harus didasarkan pada dokumen Renstra atau penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing satuan organisasi.

Penyusunan indikator kinerja sasaran :

1. Keluaran (output) adalah sesuatu berupa produk/jasa (fisik atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
2. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

#### **D. Penetapan Target**

Pada masing-masing indikator kinerja sasaran harus disertai dengan rencana tingkat capaian target kinerja masing-masing berupa kualitatif maupun kuantitatif.

## E. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah masing-masing dikembangkan ke dalam kebijakan dan program. Sementara itu, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan ke dalam perencanaan dan perjanjian kinerja, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,97
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,24
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	92,18
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	Persen	95,45
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama	Persen	89,46
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	33,53
	APK PAUD	persen	73.53
	APK SD/MI	persen	102.05
	APK SMP/MTs	persen	101.71
	Persentase Siswa SD/MI Melanjutkan ke SMP/MTs	persen	99.18
Meningkatnya Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan	PAUD Terakreditasi	Persen	39.10
	SD Terakreditasi	Persen	19.60
	SMP Terakreditasi	Persen	16.20
	Persentase PTK PAUD Tersertifikasi	Persen	94.63
	Persentase PTK SD Tersertifikasi	Persen	77.96
	Persentase PTK SMP Tersertifikasi	Persen	77.68
	Kemampuan Literasi	Skor	49,29
	Kemampuan Numerasi	Skor	36,56
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	B
Melestarikan seni dan Budaya Daerah	Jumlah Situs yang dilestarikan	Situs	10

### II.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Nomor 154

Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	SUMBER DATA
Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Dimana:  RLS : rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas  <math>X_1</math> : lama sekolah penduduk ke-I usia 25 tahun  N : jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>	Tahun	6,97	BPS
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	$EYS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Dimana:  <math>EYS_a^t</math> : harapan lama sekolah pada umur a di tahun t  <math>E_i^t</math> : Jumlah penduduk usia I yang bersekolah pada tahun t  <math>P_i^t</math> : Jumlah penduduk usia I pada tahun t  i : Usia (a, a+1, ..., n)  FK : Faktor Koreksi</p>	Tahun	14,24	BPS
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama	Jumlah anak dengan rentang usia 13-15 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan menengah pertama dibagi dengan jumlah anak dengan rentang usia 13-15 Tahun seluruhnya pada daerah yang bersangkutan.	$APS_{SMP} = \frac{\text{Jumlah siswa kel.usia sekolah 13-15TH di beberapa jenjang pendidikan}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15TAHUN}} \times 100$ <p>* Kelompok siswa usia 13-15 tahun di jenjang SD, SMP dan SM</p>	Persen	89,46	Rapor Pendidikan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	SUMBER DATA
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak dengan rentang usia 7-18 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan kesetaraan dibagi dengan jumlah anak dengan rentang usia 7-18 Tahun seluruhnya pada daerah yang bersangkutan.	$APS_{Kesetaraan} = \frac{\text{Jumlah siswa kelompok. usia sekolah 7-18 TH pada pendidikan kesetaraan}}{\text{jumlah penduduk kelompok usia 7-18 TAHUN}} \times 100$ <p>* Kelompok siswa usia 7-18 tahun di satuan pendidikan kesetaraan</p>	Persen	33,53	Rapor Pendidikan
	APK PAUD	Perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase	<p>Rumus :</p> $APK_{PAUD,SD,SMP} = \frac{\text{Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100$	persen	73.53	Rapor Pendidikan
	APK SD/MI			persen	102.05	Rapor Pendidikan
	SPK SMP/MTs			persen	101.71	Rapor Pendidikan
	Persentase lulusan SD melanjutkan ke SMP			Perbandingan antara jumlah lulusan SD/MI dengan jumlah siswa baru pada jenjang SMP/MTs	$AM_{SD/MI} = \frac{\text{Lulusan SD/MI}}{\text{Siswa Baru SMP/MTs}} \times 100$	persen
Meningkatnya Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan	PAUD Terakreditasi	Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/ atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (22). Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.	$SATPEN_{Terakreditasi} = \frac{\text{Jumlah Satpen Terakreditasi}}{\text{Jumlah Satpen Seluruhnya}} \times 100$	Persen	39.10	BAN S/M
	SD Terakreditasi			Persen	19.60	BAN S/M
	SMP Terakreditasi			Persen	16.20	BAN S/M

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	SUMBER DATA
	Persentase PTK PAUD Tersertifikasi	Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Guru dalam Jabatan sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan untuk memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	$\%PTK_{\text{Paud,SD,SMP}} = \frac{\text{Tersertifikasi}}{\text{Jml seluruh PTK PAUD, SD, SMP}} \times 100$	Persen	94.63	Rapor Pendidikan
	Persentase PTK SD Tersertifikasi			Persen	77.96	Rapor Pendidikan
	Persentase PTK SMP Tersertifikasi			Persen	77.68	Rapor Pendidikan
	Kemampuan Literasi	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).	Untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi siswa digunakan instrumen Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi, Numerasi. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat.	Skor	49,29	Rapor Pendidikan
	Kemampuan Numerasi	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	Kategori hasil capaian Kemampuan Literasi dan Numerasi. 1. Kategori Baik: Lebih dari 70% murid mencapai kompetensi minimum literasi 2. Kategori Sedang: 40%–70% murid mencapai kompetensi minimum literasi 3. Kategori Kurang: Kurang dari 40% murid mencapai kompetensi minimum literasi.	Skor	36,56	Rapor Pendidikan
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan	Nilai SAKIP OPD	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh Auditor Eksternal	Nilai	B	Inspektorat Kabupaten

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	SUMBER DATA
Melestarikan seni dan Budaya Daerah	Jumlah Situs yang dilestarikan	Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.	$JML\ SITES_{Dilestarikan} = \frac{\text{Jumlah Situs yang Dilestarikan}}{\text{Jumlah Situs Seluruhnya}} \times 100$	Situs	10	Dinas Dikbud

#### II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Perjanjian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 disajikan sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023  
KEPALA DINAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H.LALU IDHAM HALID, M.Pd.  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. LALU PATHUL BAHRI  
Jabatan : Bupati Lombok Tengah

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Praya,  
PIHAK PERTAMA

H. LALU PATHUL BAHRI

Drs. H. LALU IDHAM HALID, MPd  
NIP. 196705211992031011

PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023  
KEPALA DINAS

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun Anggaran : 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,97
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,24
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	92,18
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	Persen	95,45
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama	Persen	89,46
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	33,53
	APK PAUD	Persen	73.53
	APK SD/MI	Persen	102.05
	SPK SMP/MTs	Persen	101.71
	Persentase lulusan SD melanjutkan ke SMP	Persen	99.18
Meningkatnya Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan	PAUD Terakreditasi	Persen	39.10
	SD Terakreditasi	Persen	19.60
	SMP Terakreditasi	Persen	16.20
	Persentase PTK PAUD Tersertifikasi	Persen	94.63
	Persentase PTK SD Tersertifikasi	Persen	77.96
	Persentase PTK SMP Tersertifikasi	Persen	77.68
	Kemampuan Literasi	Skor	49,29
	Kemampuan Numerasi	Skor	36,56
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	B

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
Melestarikan seni dan Budaya Daerah	Jumlah Situs yang dilestarikan	Situs	10

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	URUSAN PENDIDIKAN			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Nilai SAKIP OPD	B	604.940.220.062
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- APK PAUD</li> <li>- APK SD</li> <li>- APK SMP/MTs</li> <li>- PAUD Terakreditasi</li> <li>- SD Terakreditasi A</li> <li>- SMP Terakreditasi A</li> <li>- % siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs</li> <li>- PKBM Terakreditasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>70,07%</li> <li>105,51%</li> <li>105,17%</li> <li>39,10%</li> <li>19,60%</li> <li>16,20%</li> <li>98,96%</li> <li>3 Lbg</li> </ul>	195.852.651.239
3.	Program Pengembangan Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Satuan Pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan local</li> <li>- Persentase satuan pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan local</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50%</li> <li>25%</li> </ul>	11.987.000
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PTK PAUD Tersertifikasi</li> <li>- PTK SD Tersertifikasi</li> <li>- PTK SMP Tersertifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>94,63</li> <li>77,96</li> <li>77,68</li> </ul>	119.924.028
5.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru	26 dok	3.973.000
6.	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase satuan pendidikan dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar</li> <li>- Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> <li>100%</li> </ul>	1.986.500
II	URUSAN KEBUDAYAAN			
7.	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah event/pertunjukan seni dan budaya yang dilaksanakan	38 Event	1.940.000.000
8.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah situs yang dilestarikan	10 Situs	88.640.000
Total Anggaran				804.765.519.093

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. LALU PATHUL BAHRI

Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd  
NIP. 196705211992031011

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja diwajibkan menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Contoh : Tingkat pendapatan penduduk, Jumlah wirausahawan baru, Jumlah pencari kerja yang ditempatkan, dll

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Contoh : Angka pengangguran, angka buta aksara, penderita DBD, angka gizi buruk, dll.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d 100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d < 85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d < 70	KURANG
5.	Nilai < 55	SANGAT KURANG

### III.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah

Dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penilaian internal untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolok ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana

tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. Capaian kinerja sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut berikut :

III.1.1 Sasaran 1, yaitu Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Capaian indicator kinerja sasaran 1 ini ditampilkan pada table 3.1

Tabel 3.1  
Capaian Sasaran Strategis  
Tahun 2023 dan 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian 2023	Realisasi 2022
Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	6,97	6,61	94,84	6,44
	Harapan Lama Sekolah	tahun	14,24	13,87	97,40	13,86
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	92,18	75,59	82,03	94,92
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	Persen	95,45	97,62%	102,47	94,99
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama	Persen	89,46	97,13%	108,57	95,57
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	33,53	83,16%	100	78,31
	APK PAUD	persen	70,07	71,37	101,85	73,10
	APK SD	persen	105,51	107,47	101,85	109,10
	APK SMP/MTs	persen	105,17	106,93	101,67	107,40
	Persentase Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	persen	98,96	99,01	100,05	99,40

III.2.2 Sasaran 2, yaitu, Meningkatnya Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan. Capaian indicator kinerja sasaran 2 ini ditampilkan pada table 3.2

Tabel 3.2  
Capaian Sasaran Strategis 2  
Tahun 2023 dan 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian 2023	Realisasi 2022
Meningkatnya Mutu, Relevansi, dan Daya	PAUD Terakreditasi	persen	39,10	39,27	100,43	69,72

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian 2023	Realisasi 2022
Saing Pendidikan						
	SD Terakreditasi A	persen	19,60	19,63	100,15	17,63
	SMP Terakreditasi A	persen	16,20	16,23	100,18	14,23
	Persentase PTK PAUD/TK Tersertifikasi	persen	94,63	94,67	100,04	42,27
	Persentase PTK SD Tersertifikasi	persen	77,96	77,99	100,03	47,59
	Persentase PTK SMP Tersertifikasi	persen	77,68	77,69	100,01	81,39
	Kemampuan Literasi	Skor	49,29	49,29	100,00	41,41
Kemampuan Numerasi	skor	36,56	36,56	100,00	24,93	

III.2.3 Sasaran 3, yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah  
Capaian indicator kinerja sasaran 3 ini ditampilkan pada table 3.3

Tabel 3.3  
Capaian Sasaran Strategis 3  
Tahun 2023 dan 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian 2023	Realisasi 2022
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	poin	B	B	100	B

III.2.4 Sasaran 4, yaitu Meningkatnya Event Seni dan Budaya yang dilaksanakan  
Capaian indicator kinerja sasaran 4 ini ditampilkan pada table 3.4

Tabel 3.4  
Capaian Sasaran Strategis 4  
Tahun 2023 dan 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian 2023	Realisasi 2022
Meningkatnya event Seni dan Budaya Daerah yang Dilaksanakan	Persentase seni dan budaya daerah yang layak pentas		20	20	100	20
	Persentase Situs Budaya yang Terpelihara		100	100	100	100

III.3 Evaluasi Perencanaan Kinerja, Pencapaian Tujuan Strategis Perangkat Daerah

Untuk mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian masing-masing indikator sasaran strategis dilakukan beberapa analisis antara lain 1). Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023, 2). Membandingkan antara realisasi kinerja

tahun 2023 dengan tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya, 3). Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target renstra, 4). Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional, 5). Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, 6). Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan 7). Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1. Indikator Kinerja Indeks Pendidikan, Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah;
  - 1.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023;

Indikator kinerja kesatu dari sasaran strategis meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah adalah Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk Indeks Pendidikan adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS). didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Perhitungan RLS dan HLS dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Lombok Tengah rata-rata lama sekolah penduduk Lombok Tengah tahun 2023 adalah 6,61 tahun meningkat 0,17 dibandingkan capaian tahun 2022 yang mencapai 6,44 tahun. Sedangkan harapan lama sekolah pendudukan Lombok Tengah pada tahun 2023 adalah 13,87 tahun meningkat dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 13,86.

- 1.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir

Jika pada tahun 2022 Rata-rata Lama Sekolah penduduk Lombok Tengah adalah 6,44 tahun, pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,17 tahun menjadi 6,61 tahun, sedangkan harapan lama sekolah tahun 2023 sebesar 13,87 tahun, meningkat 0,01 dibanding tahun 2022 yang mencapai 13,86 tahun.

- 1.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi

Dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2021-2026 indikator rata-rata Lama Sekolah tahun 2023 ditargetkan 6,97 tahun, terealisasi 6,61 tahun atau 94,84% dari target, sedangkan Harapan Lama Sekolah ditargetkan 14,24 tahun, terealisasi 13,87 tahun atau 97,40% dari target yang ditetapkan meningkat disbanding capaian tahun 2022 yang mencapai 13,86

- 1.4) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional.

Berdasarkan nilai minimum dan maksimum yang dikeluarkan oleh UNDP dan BPS, bahwa nilai maksimum angka harapan lama sekolah adalah 18 tahun. Sedang angka rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun. Meskipun capaian tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 tapi norma dan standar yang berlaku angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masih sangat jauh untuk mencapai nilai yang dikeluarkan/ditetapkan oleh UNDP maupun BPS.

NILAI MINIMUM DAN MAKSIMUM KOMPONEN IPM					
Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita disesuaikan		100 (PPP US)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP US)	26.572.352** (Rp)

Batas maksimum minimum mengacu pada UNDP kecuali indikator daya beli.  
 \* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua  
 \*\* Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

1.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa penyebab keberhasilan pencapaian indikator ini adalah :

- Tersedianya pemerataan layanan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah;
- Tersedianya program Indonesia pintar;
- Tersedianya dana operasional sekolah.
- Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi dasar siswa

1.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengalokasikan dana operasional sekolah SD dan SMP (BOS) sebesar Rp. 87,142,304,515,- untuk SD dan Rp. 32,894,482,961,- untuk SMP, dan terealisasi Rp. 118,444,757,092.00 (100%)

1.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Disamping alokasi anggaran, ditetapkan pula program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Program utama yang menunjang ketercapaian ini adalah program Pengelolaan Pendidikan, dengan kegiatan pengelolaan pendidikan dasar, dengan sub kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik Sekolah Dasar.

2. Indikator Kinerja Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD;

2.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator kinerja kedua dari sasaran strategis meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan adalah Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.

Partisipasi warga usia 5-6 tahun dalam pendidikan PAUD adalah rasio jumlah warga usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD terhadap jumlah penduduk usia 5-6 tahun.

Pada tahun 2023 indikator kinerja ini ditargetkan 92,18% dan terealisasi 75,59% atau 82,03% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan kinerja jika dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun 2022 yang mencapai 94,92%.

2.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir.

Jika pada tahun 2022 capaian indikator kinerja sasaran strategis ini mencapai 94,92% pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 75,59%. indikator sasaran strategiis ini mengalami penurunan sebesar 19,33%.

2.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi.

Jika mengacu kepada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2020-2025 Partisipasi warga usia 5-6 tahun dalam pendidikan PAUD pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 64,20%, sedangkan dalam renstra Dinas Pendidikan tahun 2021-2026, Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 92,18%, lebih tinggi 27,98% dari Target Nasional. Sampai dengan tahun 2023 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD telah terealisasi sebesar 75,59% artinya tidak mencapai target dari yang ditetapkan.

2.4) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional.

Demikian pula halnya dengan indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, idealnya pencapaian untuk indikator ini adalah 100%. Jika masih belum mencapai 100% berarti masih ada warga negara usia 5-6 tahun yang belum terlayani dan berpartisipasi dalam PAUD, sebaliknya jika angka partisipasi warga negara 5-6 tahun lebih dari 100% dapat diasumsikan bahwa terdapat warga negara usia 5-6 tahun dari luar kabupaten/kota.

2.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor penyebab kegagalan pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis ini antara lain, belum semua orang tua memahami pentingnya PAUD, terbatasnya jumlah lembaga PAUD terutama di daerah terpencil, terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana PAUD yang menjadi salah satu pertimbangan orang tua untuk memasukkan anaknya di lembaga PAUD, dan profesionalisme guru PAUD. Adapun alternatif solusi yang perlu dilakukan adalah : meningkatkan anggaran pendidikan PAUD, manajemen pengelolaan sekolah/lembaga yang baik, mengembalikan fungsi sekolah sebagai wadah mencerdaskan generasi penerus bangsa bukan sebagai ladang bisnis, Penyusunan kurikulum hendaknya mempertimbangkan segala potensi alam, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang ada, profesionalisme guru dan pemberdayaan guru dengan program-program latihan sehingga mampu mengembangkan model-model pengajaran secara variatif,

2.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan pagu dana yang ada, untuk mencapai target indikator kinerja ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2023 mengalokasikan anggaran melalui program pengelolaan pendidikan PAUD.

2.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Seperti halnya program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, antara lain Program/Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan sub kegiatan antara lain:

- (1) Pembangunan Gedung/ ruang kelas sekolah PAUD;
- (2) Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD;
- (3) Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD;
- (4) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga PAUD;
- (5) Pengelolaan dana BOP PAUD;
- (6) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD;
- (7) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD.

3. Indikator Kinerja Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar;

3.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator kinerja ketiga dari sasaran strategis meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan adalah Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.

Partisipasi warga usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar adalah rasio jumlah warga usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan dasar terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

Pada tahun 2023 indikator kinerja ini ditargetkan 95,45% dan terealisasi 97,62% atau 102,47% dari target yang ditetapkan.

- 3.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir.

Jika pada tahun 2022 capaian indikator kinerja sasaran strategis ini mencapai 94,99% pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 97,62%. indikator sasaran strategis ini mengalami peningkatan sebesar 2,63%.

- 3.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi.

Jika mengacu kepada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2020-2025 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 78,40%, sedangkan dalam renstra Dinas Pendidikan tahun 2021-2026, Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 95,45%, lebih tinggi 17,05% dari Target Nasional. Sampai dengan tahun 2023 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar telah terealisasi sebesar 97,62% artinya melampaui target dari yang ditetapkan.

- 3.4) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional.

Demikian pula halnya dengan indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, idealnya pencapaian untuk indikator ini adalah 100%. Jika masih belum mencapai 100% berarti masih ada warga negara usia 7-12 tahun yang belum terlayani dan berpartisipasi dalam pendidikan dasar, sebaliknya jika angka partisipasi warga negara 7-12 tahun lebih dari 100% dapat diasumsikan bahwa terdapat warga negara usia 7-12 tahun dari luar kabupaten/kota.

- 3.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis ini antara lain, orang tua semakin memahami pentingnya pendidikan dasar, pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang semakin terjangkau samapi ke daerah terpencil, peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar, dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru pendidikan dasar sehingga mampu mengembangkan model-model pengajaran secara variatif

- 3.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan pagu dana yang ada, untuk mencapai target indikator kinerja ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2023 mengalokasikan anggaran melalui program pengelolaan pendidikan dasar.

3.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Seperti halnya program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam dasar, antara lain Program/Kegiatan Pendidikan dasar dengan sub kegiatan antara lain:

- (1) Penambahan ruang kelas baru SD;
- (2) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU;
- (3) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD;
- (4) Pengadaan Meubel Sekolah SD;
- (5) Penyediaan biaya personil peserta didik SD;
- (6) Peyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik SD;
- (7) Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah SD;
- (8) Pengelolaan dana BOS sekolah dasar;

4. Indikator Kinerja Tingkat Partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama;

4.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator kinerja keempat dari sasaran strategis meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan adalah Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.

Partisipasi warga usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama adalah rasio jumlah warga usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan menengah pertama terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

Pada tahun 2023 indikator kinerja ini ditargetkan 89,46% dan terealisasi 97,13% atau 108,57% dari target yang ditetapkan.

4.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir.

Jika pada tahun 2022 capaian indikator kinerja sasaran strategis ini mencapai 95,57% pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 97,13%. indikator sasaran strategiis ini mengalami peningkatan sebesar 1,56%.

4.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi.

Jika mengacu kepada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2020-2025 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama pada tahun 2023 ditargetkan sebesar

68,68%, sedangkan dalam renstra Dinas Pendidikan tahun 2021-2026, Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 89,46%, lebih tinggi 20,78% dari Target Nasional. Sampai dengan tahun 2023 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama telah terealisasi sebesar 97,13% artinya melampaui target dari yang ditetapkan.

4.4) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional.

Demikian pula halnya dengan indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama, idealnya pencapaian untuk indikator ini adalah 100%. Jika masih belum mencapai 100% berarti masih ada warga negara usia 13-15 tahun yang belum terlayani dan berpartisipasi dalam pendidikan menengah, sebaliknya jika angka partisipasi warga negara 13-15 tahun lebih dari 100% dapat diasumsikan bahwa terdapat warga negara usia 13-15 tahun dari luar kabupaten/kota.

4.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis ini antara lain, orang tua semakin memahami pentingnya pendidikan menengah pertama, pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang semakin terjangkau samapi ke daerah terpencil, peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan menengah pertama, dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru pendidikan menengah pertama sehingga mampu mengembangkan model-model pengajaran secara variatif

4.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan pagu dana yang ada, untuk mencapai target indikator kinerja ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2023 mengalokasikan anggaran melalui program pengelolaan pendidikan menengah pertama.

4.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Seperti halnya program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam menengah pertama, antara lain Program/Kegiatan Pendidikan menengah pertama dengan sub kegiatan antara lain:

- (1) Penambahan ruang kelas baru SMP;
- (2) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP;
- (3) Pengadaan meubel sekolah SMP;
- (1) Penyediaan biaya personil peserta didik SMP;
- (2) Perlengkapan dasar buku teks peserta didik SMP;

- (3) Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik SMP;
  - (4) Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah SMP;
  - (5) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP.
5. Indikator Kinerja Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan;

5.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator kinerja kelima dari sasaran strategis meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan adalah Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Partisipasi warga usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan adalah rasio jumlah warga usia 7-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar kesetaraan terhadap jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Pada tahun 2023 indikator kinerja ini ditargetkan 33,53% dan terealisasi 83,16% atau 100 % dari target yang ditetapkan.

5.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir.

Jika pada tahun 2022 capaian indikator kinerja sasaran strategis ini mencapai 78,31% pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 83,16%. indikator sasaran strategiis ini mengalami peningkatan sebesar 4,85%.

5.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi.

Jika mengacu kepada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2020-2025 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 23,53%, sedangkan dalam renstra Dinas Pendidikan tahun 2021-2026, Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 33,53%, lebih tinggi 10,00% dari Target Nasional. Sampai dengan tahun 2023 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan telah terealisasi sebesar 83,16% artinya melampaui target dari yang ditetapkan.

5.4) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional.

Demikian pula halnya dengan indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, idealnya pencapaian untuk indikator ini adalah 100%. Jika masih belum mencapai 100% berarti masih ada warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, sebaliknya jika angka partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan lebih dari 100% dapat diasumsikan bahwa terdapat warga negara usia 7-18 tahun dari luar kabupaten/kota.

5.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis ini antara lain, orang tua semakin memahami pentingnya pendidikan dasar, pendidikan menengah (kesetaraan), pemerataan dan perluasan akses lembaga pendidikan yang semakin terjangkau samapi ke daerah terpencil, peningkatan fasilitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan, dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru/tutor pendidikan kesetaraan sehingga mampu mengembangkan model-model pengajaran secara variatif

5.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan pagu dana yang ada, untuk mencapai target indikator kinerja ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2023 mengalokasikan anggaran melalui program pengelolaan pendidikan kesetaraan.

5.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Seperti halnya program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, antara lain Program/Kegiatan Pendidikan nonformal/kesetaraan dengan sub kegiatan antara lain:

- (1). Pembinaan kelembagaan dan manajemen pendidikan nonformal/kesetaraan;
- (2). Pengelolaan dana BOP sekolah nonformal/kesetaraan.
- (3). Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

6. Indikator Kinerja APK PAUD

6.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator kinerja keenam dari sasaran strategis meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD.

APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan di daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat siswa yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota atau terletak pada daerah perbatasan.

Pada tahun 2023 indikator kinerja ini ditargetkan 70,07% dan terealisasi 71,37% atau 101,85% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kinerja jika dilihat dari segi pemerataan dan akses pendidikan bagi penduduk usia 5-6 tahun.

- 6.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir.

Jika pada tahun 2022 capaian indikator kinerja sasaran strategis ini mencapai 73,10% pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 71,37%, dan jika dibandingkan antara tahun 2023 dengan tahun 2021 capaian kinerja indikator sasaran strategis ini mengalami penurunan sebesar 19,41%.

- 6.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi.

Jika mengacu kepada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2020-2025 APK PAUD pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 75,59%, sedangkan dalam renstra Dinas Pendidikan tahun 2021-2026, APK PAUD pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 70,07%, lebih rendah 5,52% dari Target Nasional. Sampai dengan tahun 2023 APK PAUD telah terealisasi sebesar 71,37% artinya telah melampaui target dari yang ditetapkan.

- 6.4) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional.

Demikian pula halnya dengan indikator angka partisipasi kasar, idealnya pencapaian untuk indikator ini adalah 100%. Jika masih belum mencapai 100% berarti masih ada anak usia sekolah yang belum terlayani di satuan pendidikan PAUD, sebaliknya jika angka partisipasi kasar lebih dari 100% dapat diasumsikan bahwa terdapat anak diluar usia sekolah atau terdapat anak yang tinggal kelas.

- 6.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis ini antara lain, semakin baiknya mutu dan kualitas manajemen penyelenggaraan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus menerus melakukan berbagai pengembangan pendidikan anak usia melalui kegiatan penguatan

kapasitas manajemen pengelola, penguatan kapasitas guru melalui pelatihan berjenjang.

6.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Seperti halnya untuk mencapai indikator lembaga PAUD Terakreditasi, untuk mencapai indikator kinerja APK PAUD, pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran penyelenggaraan PAUD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBN sebesar Rp. 34.467.600.000,00 terealisasi sebesar Rp.33.328.339.833,00 (96,69%) dari pagu anggaran. Dana tersebut dianggarkan untuk BOP bagi 969 lembaga PAUD Formal dan Non Formal/Kesetaraan.

6.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Seperti halnya program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja Lembaga PAUD Terakreditasi, program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja APK PAUD antara lain Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan kegiatan antara lain:

1. Pembangunan Gedung/ ruang kelas sekolah PAUD;
2. Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD;
3. Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD;
4. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga PAUD;
5. Pengelolaan dana BOP PAUD;
6. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD;
7. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD.

7. Indikator Kinerja APK SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B

APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan di daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat siswa yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota atau terletak pada daerah perbatasan. APK digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan dan daerah.

7.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023 Indikator Kinerja APK SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B ditargetkan sebesar 105,51% untuk SD dan 105,17% untuk SMP, dari target tersebut APK SD/MI/Paket A terealisasi 106,93% atau 101,85% dari target sedangkan APK SMP/MTs/Paket B terealisasi 107,51% atau 101,67% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu dari tiga pilar Pendidikan, yaitu perluasan dan pemerataan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah secara umum telah

terpenuhi.

- 7.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir.

Meskipun capaian indikator ini pada tahun ini melampaui target yang ditetapkan namun terjadi penurunan jika dibanding realisasi tahun 2022.

Tahun 2022 realisasi capaian kinerja APK SD/MI/Paket A 109,10% turun 1,63% menjadi 107,47% pada tahun 2023. APK SMP/MTs/Paket B dari 107,40% turun menjadi 106,93%. Penurunan ini bukan disebabkan oleh menurunnya kinerja perangkat daerah tetapi lebih disebabkan karena banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah pada satuan Pendidikan yang sesuai dengan usia sekolahnya.

- 7.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi.

Dalam rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021-2026, APK SD/MI/Paket A dan APK SMP/MTs/Paket B ditargetkan 105,51% dan 105,17%. Sampai dengan tahun 2023 yang merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan renstra telah terealisasi 107,47% dan 106,93%.

- 7.4) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional.

Dalam Renstra Kemdikbud tahun 2020-2024, indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat target tahun 2023 ditarget sebesar 101,49% sedangkan dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2021-2026 pada tahun 2023 ditargetkan 105,51 %, lebih lebih tinggi 4,02% dibandingkan dengan target Kemdikbud.

Tabel 4.1 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang						
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	40,20	42,62	45,21	47,81	53,10
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	105,97	104,48	102,98	101,49	100,00
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	%	92,46	94,34	96,23	98,11	100,00
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	86,18	88,39	90,59	92,80	95,00
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	%	33,47	34,56	35,62	36,64	37,63
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang						
IKSS 2.1	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	Nilai	3	3,25	3,5	3,7	4
IKSS 2.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	57,2	58,2	59,2	60,2	61,2
IKSS 2.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26,5	27,4	28,3	29,2	30,1
IKSS 2.4	Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	Nilai	-	394	-	-	396
IKSS 2.5	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	Nilai	-	385	-	-	388

Sumber Renstra: Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

- 7.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terdapat beberapa penyebab target keberhasilan/kegagalan APK SD/MI/Paket A dan APK SMP/MTs/Paket B dapat tercapai antara lain:

- Tersedianya akses bagi penduduk usia sekolah, meningkatnya jumlah daya tampung, dan akses transportasi;
- Tersedianya dana bantuan operasional sekolah, mampu mencegah dan mengurangi siswa putus sekolah.

#### 7.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mencapai target indikator kinerja ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2023 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 168.666.355.177,00 melalui Program Pengelolaan Pendidikan ( Pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama) .

#### 7.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Disamping alokasi anggaran, ditetapkan pula program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mendukung pencapaian indikator kinerja ini, antara lain:

##### 1). Kegiatan Utama

- (1) Penambahan ruang kelas baru SD;
- (2) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU;
- (3) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD;
- (4) Pengadaan Meubel Sekolah SD;
- (5) Penambahan ruang kelas baru SMP;
- (6) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP;
- (7) Pengadaan meubel sekolah SMP;

##### 2). Kegiatan Pendukung

- (1) Penyediaan biaya personil peserta didik SD;
- (2) Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik SD;
- (3) Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah SD;
- (4) Pengelolaan dana BOS sekolah dasar;
- (5) Penyediaan biaya personil peserta didik SMP;
- (6) Perlengkapan dasar buku teks peserta didik SMP;
- (7) Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik SMP;
- (8) Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah SMP;
- (9) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP

### 8. Indikator Kinerja Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs.

#### 8.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023 indikator kinerja Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs ditargetkan sebesar, 98,96%, dan terealisasi sebesar 99,01% atau 100,05% dari target yang telah ditetapkan.

- 8.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir.

Meskipun capaian tahun 2023 melampaui target yg ditetapkan, namun jika dibandingkan dengan tahun 2022, capaian tahun 2023 ini mengalami penurunan dari 99,40% menjadi 99,01%. Penurunan ini bukan disebabkan oleh banyaknya lulusan SD yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP/MTs tetapi diasumsikan lulusan SD/MI melanjutkan ke pondok pesantren baik di wilayah Lombok Tengah maupun diluar wilayah Lombok Tengah yang datanya belum diperoleh baik dari system pendataan dapodik maupun pendataan EMIS pada Kementerian Agama. ngkat 0,07% menjadi 99,47%.

- 8.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi.

Sampai dengan tahun 2023 realisasi indikator kinerja sasaran ini jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2021-2026 capaiannya melampaui target yang ditetapkan. Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs di dalam renstra pada tahun 2023 ditargetkan 98,96% terealisasi 99,01% atau 100,05% dari target.

- 8.4) Analisis perebandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional.

Norma/standar secara nasional capaian indicator ini idealnya adalah 100%, artinya semuanya lulusan SD/MI melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

- 8.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor pendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis ini anatara lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus menerus melakukan pengembangan dan peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan bagi anak usia sekolah disamping juga adanya Tingkat kesadaran masyarakat yang terus meningkat terhadap pemenuhan kebutuhan Pendidikan putra-putrinya.

- 8.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 291.401.929,00 dan terealisasi sebesar Rp. 290.320.600,00 (99,63%). melalui sub kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar.

- 8.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program dan kegiatan baik yang langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

9. Indikator Kinerja PAUD Terakreditasi;

9.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator kinerja kesatu dari sasaran strategis meningkatnya mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan adalah lembaga PAUD Terakreditasi.

Akreditasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas dan inovasinya. Serta untuk memberikan jaminan kepada publik bahwa sekolah tersebut telah diakreditasi dan menyediakan layanan pendidikan yang memenuhi standar akreditasi nasional.

Pada tahun 2023 indikator PAUD Terakreditasi ditargetkan 39,10% terealisasi 39,27% atau 100,43% dari target yang ditetapkan.

9.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir.

Jika pencapaian year to year pencapaian indicator ini melampaui target yang ditetapkan, tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaian indikator kinerja sasaran strategis ini mengalami penurunan dari 69,72% menjadi 39,27% pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2022 menghitung seluruh PAUD yang terakreditasi, sedang pada tahun 2023 hanya menghitung PAUD terakreditasi minimal B.

9.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi.

Dalam Restra Dinas Pendidikan tahun 2021-2026, lembaga PAUD Terakreditasi pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 39,10% dari total 931 lembaga PAUD. Sampai dengan tahun 2023 telah terakreditasi sebanyak 364 PAUD terakreditasi minimal B.

9.4) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional.

Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini mengamanatkan bahwa setiap lembaga PAUD wajib dilakukan diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Jika mengacu kepada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2020-2025 jumlah lembaga PAUD terakreditasi pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 42.926 lembaga, sedangkan dalam renstra Dinas Pendidikan tahun 2021-2026, lembaga PAUD Terakreditasi pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 39,10% dari total 931 lembaga PAUD. Sampai dengan tahun 2023 dari 931 PAUD telah terakreditasi sebanyak 39,10% atau terakreditasi minimal B.

9.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis ini antara lain, semakin baiknya mutu dan kualitas manajemen penyelenggaraan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus menerus melakukan berbagai pengembangan pendidikan anak usia melalui kegiatan penguatan kapasitas manajemen pengelola, penguatan kapasitas guru melalui pelatihan berjenjang.

9.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berbagai ikhtiar telah dilakukan dalam upaya pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan diantaranya penyediaan dana bagi penyelenggaraan dan pengembangan PAUD serta pengalokasian anggaran. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran penyelenggaraan PAUD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBN sebesar Rp. 48.555.381.433,00 terealisasi sebesar Rp. 47.113.369.108,00 (97,00%) dari pagu anggaran. Dana tersebut dianggarkan untuk BOP bagi 455 lembaga PAUD Formal dan Non Formal/Kesetaraan.

9.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja ini, antara Proram Pendidikan Anak Usia Dini dengan sub kegiatan antara lain:

- (1) Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD;
- (2) Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD;
- (3) Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD;
- (4) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD;
- (5) Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD;
- (6) Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD;
- (7) Pengelolaan dana BOP PAUD;
- (8) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD.

10. Indikator Kinerja SD dan SMP Terakreditasi

Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan sekolah/madrasah.

Sesuai pasal 8 Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah bahwa program dan satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir.

10.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023 ditargetkan 19,60% (123 SD) dari 631 SD Terakreditasi A dan terealisasi 19,63% (124 SD). Sedangkan SMP ditargetkan 16,20% (34 SMP) dari 213 SMP terakreditasi A dan terealisasi 16,23% (35 SMP);

- 10.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir.

Jika pada tahun 2022 jumlah SD yang terakreditasi A sebanyak 17,63% dari 616 SD, naik sebesar 2,02% menjadi 19,63% pada tahun 2023, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 capaian kinerja indikator sasaran strategis ini mengalami peningkatan sebesar 9,90%.

Untuk jenjang SMP, pada tahun 2022 jumlah SMP terkreditasi A sebesar 14,23% (28 SMP) dari 196 SMP naik sebesar 2,04% menjadi 16,27% (35 SMP) dari 213 SMP pada tahun 2023 dan jika dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja indikator sasaran strategis ini juga mengalami kenaikan sebesar 7,47%.

- 10.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi.

Jika mengacu kepada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2020-2025, persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 84,20% sedangkan persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B ditargetkan 81,00%.

Dalam renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021-2026 SD terakreditasi A pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 19,60% terealisasi 19,63% atau 100,25% dari target, sedangkan SMP terakreditasi A ditargetkan sebesar 16,20% terealisasi 16,23% atau 100,18% dari target renstra.

- 10.4) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional.

Secara nasional belum ada norma atau standar untuk menentukan berapa besaran satuan pendidikan baik SD maupun SMP yang harus terakreditasi A, tetapi sesuai dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan wajib dilakukan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar, Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

- 10.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk jenjang SD dari 19,60% SD terakreditasi A yang ditargetkan dapat tercapai 19,63% atau 100,15% dari target renstra, jenjang SMP dari 16,20% SMP Terakreditasi A yang ditargetkan dapat tercapai 16,23% atau 100,43% dari target renstra. Masih rendahnya target dan ketercapaian dari indikator kinerja ini disebabkan karena:

- 1) Belum terpenuhinya delapan standar nasional pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang meliputi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, dan Standar Pembiayaan;
- 2) Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan atau penataan arsip dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang tidak tertib;
- 3) Implementasi program dan kegiatan tidak sesuai RKAS yang ada.

10.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan pagu dana yang ada, untuk mencapai target indikator kinerja ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2023 mengalokasikan anggaran melalui program pengelolaan pendidikan.

10.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program dan kegiatan baik yang langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan program pendidik dan tenaga kependidikan.

11. Indikator Kinerja PTK PAUD, SD dan SMP Tersertifikasi

11.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023 indikator kinerja PTK PAUD, SD dan SMP tersertifikasi masing-masing ditargetkan sebesar, 94,63%, 77,96% dan 77,68%. Dari data yang ada pada Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, diketahui bahwa jumlah PTK PAUD, SD dan SMP yang telah bersertifikasi adalah sebagai berikut :

- (1) PTK PAUD telah tersertifikasi 94,67% atau 100,04% dari target ditetapkan
- (2) PTK SD telah tersertifikasi 77,99 % atau 100,03% dari target yang ditetapkan
- (3) PTK SMP telah tersertifikasi 77,69% atau 100,01% dari target yang ditetapkan

11.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 realisasi tahun 2023 ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi, antara lain, PTK PAUD dari 42,27% meningkat menjadi 94,67% pada tahun 2023, PTK SD dari 47,59% meningkat menjadi 77,99% pada tahun 2023, kecuali PTK SMP tersertifikasi meski capaian tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan namun jika dibanding tahun 2023 rata-rata capaiannya mengalami penurunan dari 81,39% menurun menjadi 77,69% pada

tahun 2023, penurunan ini disebabkan banyak guru yang memasuki masa purna tugas dan jumlah guru yang lulus PPG juga mengalami penurunan.

- 11.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi.

Sampai dengan tahun 2023 realisasi ketiga indikator kinerja sasaran ini jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2021-2026 rata-rata capaiannya sudah memenuhi target yang ditetapkan.

- 11.4) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional.

Secara nasional belum ada standar yang dijadikan acuan untuk indikator ini, tetapi idealnya seluruh guru harus memiliki sertifikat pendidik untuk memperoleh tunjangan sertifikasi pendidik.

- 11.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tingkat ketercapaian dan ketidaktercapaian dari indikator ini ditentukan melalui besarnya kuota dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, diperoleh melalui proses/diawali dari : 1). Guru mengikuti Free Test PPG (Pendidikan Profesi Guru), 2). Guru yang dinyatakan lulus Free Test PPG berhak mengikuti pendampingan secara online oleh LPTK , 3). Setelah pendampingan secara online dilanjutkan dengan Workshop PPG, 4). Bagi guru yang dinyatakan lulus PPG berhak memperoleh sertifikat pendidik.

- 11.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 119.924.028,00 dan terealisasi sebesar Rp. 114.949.860,00 (95,85%).

- 11.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja sasaran ini adalah program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan Pemerataan kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan;

## 12. Indikator Kinerja Kemampuan Literasi

- 12.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Saat ini, istilah Literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas. Dan sudah merambah pada praktik kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial dan politik. Sedangkan kemampuan

Literasi adalah Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.

Pada tahun 2023 indikator kinerja Kemampuan Literasi ditargetkan sebesar, skor 49,29. Terealisasi sebesar skor 49,29 atau 100,00% dari target ditetapkan

- 12.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, realisasi tahun 2023 ini mengalami peningkatan dari skor 41,41 meningkat menjadi skor 49,29 atau meningkat skor 7,41 pada tahun 2023,

- 12.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi.

Sampai dengan tahun 2023 realisasi indikator kinerja sasaran ini jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2021-2026 rata-rata capaiannya sudah memenuhi target yang ditetapkan.

- 12.4) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional.

Standar nasional pendidikan adalah kriterial minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia. SNP adalah standar yang dijadikan acuan untuk indikator ini. IKM Literasi dengan skor 40 ke bawah kategori kurang, skor 40-70 kategori sedang, dan 70-100 kategori baik. Dari data hasil rapor pendidikan Kabupaten Lombok Tengah masih kategori sedang dengan skor 49,29.

- 12.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tingkat ketercapaian dan ketidaktercapaian dari indikator ini ditentukan melalui :

- 1). Kecukupan formasi Guru Asn untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda,
- 2). Indeks distribusi Guru, 3). Kualitas Pembelajaran.

- 12.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran melalui program pengelolaan pendidikan.

- 12.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja sasaran ini adalah program pengelolaan pendidikan dengan kegiatan penegelolaan pendidikan dasar dan pengelolaan pendidikan menengah pertama;

### 13. Indikator Kinerja Kemampuan Numerasi

#### 13.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Kemampuan Numerasi adalah Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.

Pada tahun 2023 indikator kinerja Kemampuan Numerasi ditargetkan sebesar, skor 36,56. Terealisasi sebesar skor 35,56 atau 100,00% dari target ditetapkan

#### 13.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, realisasi tahun 2023 ini mengalami peningkatan dari skor 24,93 meningkat menjadi skor 36,56 atau meningkat skor 10,63 pada tahun 2023,

#### 13.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi.

Sampai dengan tahun 2023 realisasi indikator kinerja sasaran ini jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2021-2026 rata-rata capaiannya sudah memenuhi target yang ditetapkan.

#### 13.4) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional.

Standar nasional pendidikan adalah kriterial minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia. SNP adalah standar yang dijadikan acuan untuk indikator ini. IKM Numerasi dengan skor 40 ke bawah kategori kurang, skor 40-70 kategori sedang, dan 70-100 kategori baik. Dari data hasil rapor pendidikan Kabupaten Lombok Tengah masih kategori kurang dengan skor 36,56.

#### 13.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tingkat ketercapaian dan ketidaktercapaian dari indikator ini ditentukan melalui :

- 1). Kecukupan formasi Guru Asn untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda,
- 2). Indeks distribusi Guru, 3). Kualitas Pembelajaran.

#### 13.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran melalui program pengelolaan pendidikan.

#### 13.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja sasaran ini adalah program pengelolaan pendidikan dengan kegiatan penegelolaan pendidikan dasar dan pengelolaan pendidikan menengah pertama;

14. Indikator Kinerja Nilai SAKIP OPD.

14.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023;

Pada tahun 2023 indikator ini ditargetkan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan surat Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor:700/33/INSP/2023/RHS/ tanggal, 13 Juli 2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, Nilai Hasil Evaluasi adalah 63,90 Tingkat Akuntabilitas Kinerja B (Baik) meningkat menjadi 67,10 Tingkat Akuntabilitas Kinerja B (Baik)

14.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir.

Hasil temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 sebesar 100% sama dengan tahun 2022 sebesar 100%. Perolehan nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2023 atas pelaksanaan kinerja tahun 2022 dengan predikat B atau sama dengan 67,10 (cukup memuaskan), meningkat 3,20 jika dibandingkan dengan hasil penilaian tahun 2022 atas pelaksanaan kinerja tahun 2021 sebesar 63,90

14.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi.

Sampai dengan tahun 2023 realisasi indikator kinerja sasaran ini jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2021-2026 capaiannya sama dengan target yang ditetapkan. Nilai SAKIP di dalam renstra pada tahun 2023 ditargetkan nilai B terealisasi nilai B.

14.4) Analisis perebandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional.

Secara nasional standard ideal indikator Nilai SAKIP adalah A (memuaskan)

14.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor pendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis ini anatara lain:

1. Perencanaan kinerja dalam Renstra dan Renja selalu dievaluasi dan diperbarui sehingga ada keselarasan antara program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Pelaporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja keuangan dan fisik sesuai waktu yang ditentukan;

3. Evaluasi kinerja mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dilakukan secara berkala pada saat apel pagi atau saat rapat koordinasi rutin;
4. Pengukuran kinerja yakni pemanfaatan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan kinerja tahun berjalan.

14.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 145.763.269,00 dan terealisasi sebesar Rp. 140.789.000,00 (96,59%).

14.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program dan kegiatan baik yang langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

15. Indikator Kinerja Seni dan Budaya Daerah yang layak pentas, dan Situs Budaya Daerah yang terpelihara.

Kebudayaan merupakan hal kompleks yang mencakup beberapa hal di dalamnya seperti kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat serta kemampuan yang dapat diperoleh manusia sebagai bagian dari kelompok masyarakat.

15.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023;

Pada tahun 2023 indikator Seni dan Budaya Daerah yang layak pentas, dan Situs Budaya Daerah yang terpelihara ditargetkan 20,00% dan 100% terealisasi 20,00%, dan 100%.

15.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir;

Bidang Kebudayaan merupakan bidang baru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bidang ini menjadi bagian dari dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2023, sehingga perbandingan realisasi kinerja ini 0%

15.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi

Dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2021-2026 indikator kinerja Seni dan Budaya daerah yang layak pentas, dan indikator Situs Budaya Daerah yang terpelihara di dalam renstra pada tahun 2023 ditargetkan 20,00%, dan 100% terealisasi 20,00% atau 100,00% dari target, dan 100% atau 100% dari target target.

15.4) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional.

Secara nasional belum ada norma atau standar untuk menentukan berapa besaran yang harus terealisasi bagi satuan pendidikan.

- 15.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa penyebab keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan berbagai event seni dan budaya, pengembangan pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat yang memiliki budaya tersebut.

- 15.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3.035.000.000,00 dan terealisasi Rp. 3.023.355.000,00 (99,62%), Rp. 88.640.000,00 dan terealisasi Rp. 88.225.350,00 (99,59%).

- 15.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Disamping alokasi anggaran, ditetapkan pula program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Program utama yang menunjang ketercapaian ini adalah program Pengembangan Kebudayaan dan program Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

#### III.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah berupa laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran olah OPD. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional, dan perspektif sistem akuntabilitas. Sumber daya keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah berasal dari Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dari Pemerintah Pusat yang dicatat ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023. Adapun komposisinya sebagai berikut :

	Uraian	Anggaran tahun 2023	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Belanja Daerah	805.032.019.093	804.765.519.093
1.1	Belanja Operasi	759.240.650.531	758.974.150.531
1.2	Belanja Modal	45.791.368.562	45.791.368.562

Realisasi dana yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	584.282.271.955	549.824.591.243	94,10
2	Program Pengelolaan Pendidikan	217.221.736.610	209.965.384.931	96,66
3	Program Pengembangan Kurikulum	11.987.000	9.998.200	83,33
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	119.924.028	114.949.860	95,85
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	3.973.000	1.976.000	49,74
6	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	1.986.500	1.937.500	97,53
7	Program Pengembangan Kebudayaan	3.035.000.000	3.028.355.000	99,62
8	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	88.640.000	88.225.350	99,53
	Total	804.765.519.093	763.034.408.084	94,81

## B A B IV PENUTUP

Secara umum pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis berdasarkan hasil evaluasi internal adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan rata-rata pencapaiannya adalah 110,01% atau kategori Amat Baik;
2. Sasaran Meningkatnya mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan rata-rata pencapaiannya adalah 115% atau kategori Amat Baik;
3. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah rata-rata pencapaiannya adalah 100% atau kategori Baik.
4. Sasaran Meningkatnya event seni dan budaya yang dilaksanakan rata-rata pencapaiannya adalah 100% atau kategori Baik

Secara keseluruhan rata-rata realisasi keempat sasaran strategis tersebut adalah 106,25% dengan kategori Amat Baik

Sebagai ikhtiar untuk mencapai target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 804.765.519.093,00 terdiri dari Belanja Langsung Rp.650.261.131.617 (80,80%) dan dana BOS/BOP Rp. 154.504.387.476, (19,20%) yang dijabarkan kedalam 8 program dengan 20 kegiatan, dan 77 sub kegiatan, terealisasi sebesar Rp.766.376.613.845,00 (97,75%).

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menyelesaikan kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang kompeten, Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

Kepala Dinas

# Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.PD  
NIP. 196705211992031011